

Journal of Government Insight

ISSN: 2789-7418 (online)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sinjai.



A Comparative Analysis of the Implementation of Regional Head Elections in Mojokerto Regency and Kuantan Singingi Regency

Analisis Komparatif Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi

Kencana Violeta Maharsi Asmanto¹, Ataya Qonita Ananta², Virani Nabillah Putri³,
Iradhad Taqwa Sihidi⁴, Ach. Apriyanto Romadhan⁵

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Email Penulis: kencanavioleeta@gmail.com

Article Info

Abstrak

Received:
24/07/2025
Revised:
03/08/2025
Accepted:
12/12/2025

Keywords:
Pilkada; Partisipasi;
Demokrasi Lokal

Abstarct: This study examines the implementation of the Regional Head Election (Pilkada) in Mojokerto Regency, East Java, and Kuantan Singingi Regency, Riau. This study uses a comparative method with a descriptive qualitative approach. The focus of the study includes the level of public participation, the quality of the election implementation, and the effectiveness of the election implementation. The results of the analysis show significant differences, especially in terms of political participation patterns where Mojokerto Regency shows a very consistent increasing trend from 60% (2015) to 86.67% (2024), an increase of 26.67 percentage points and exceeding the national average. Meanwhile, Kuantan Singingi Regency experiences fluctuations with a "V" pattern, starting from 73.85% (2015), decreasing to 67.41% (2020) due to the impact of the COVID-19 pandemic, then recovering to 76.76% (2024). In terms of effectiveness, Mojokerto Regency shows higher Pilkada effectiveness due to the support of favorable geographical conditions, strong economic stability, and solid institutions. Meanwhile, Kuantan Singingi Regency faces significant challenges in all three areas that hamper the effectiveness of the regional elections. Difficult geographic conditions, compounded by economic constraints and institutional weaknesses, create complex challenges. Thus, this study underscores that the effectiveness of regional elections is not solely determined by national institutional design but also depends heavily on local preparedness, encompassing geography, economic capacity, and the quality of inter-institutional interactions.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, dan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Fokus kajian meliputi tingkat partisipasi masyarakat, kualitas penyelenggaraan pilkada, dan efektivitas pelaksanaan pilkada. Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terutama dalam hal pola partisipasi politik dimana Kabupaten Mojokerto memperlihatkan tren peningkatan yang sangat konsisten dari 60% (2015) menjadi 86,67% (2024), meningkat 26,67 poin persentase dan melampaui rata-rata nasional. Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi mengalami fluktuasi dengan pola seperti huruf "V", dimulai dari 73,85% (2015), turun ke 67,41% (2020) akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian bangkit kembali ke 76,76% (2024). Dalam hal efektivitas, Kabupaten Mojokerto menunjukkan efektivitas Pilkada yang lebih tinggi karena dukungan kondisi geografis yang menguntungkan, stabilitas ekonomi yang kuat, dan kelembagaan yang solid. Sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi tantangan signifikan di ketiga aspek yang menghambat efektivitas Pilkada. Kondisi geografis yang sulit diperparah oleh keterbatasan ekonomi dan kelemahan kelembagaan, menciptakan tantangan yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas Pilkada bukan hanya ditentukan oleh desain kelembagaan nasional, tetapi sangat bergantung pada kesiapan lokal yang mencakup geografi, kapasitas ekonomi, serta kualitas interaksi antar lembaga.



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan salah satu instrumen fundamental dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sistem pemilihan kepala daerah telah mengalami transformasi signifikan dari pemilihan tidak langsung melalui DPRD menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Transformasi ini merefleksikan komitmen Indonesia terhadap penguatan demokrasi lokal dan pemberdayaan partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah (Ridhuan et al., 2021). Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada hak-hak yang dimiliki masyarakat. Demokrasi langsung juga menciptakan peluang bagi warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan (García, 2020). Pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan dinamika yang beragam, baik dari aspek partisipasi politik, kualitas penyelenggaraan, maupun dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi lokal (Kurniawan & Handayani, 2022).

Keberagaman dinamika Pilkada di Indonesia tidak terlepas dari perbedaan karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekonomi politik yang melekat pada setiap daerah (Guyanie, 2025). Faktor-faktor ini berkontribusi pada munculnya pola kompetisi yang unik di setiap wilayah. Perbedaan ini semakin nyata ketika membandingkan daerah-daerah yang memiliki latar belakang historis, struktur sosial, dan sistem politik lokal yang berbeda. Studi komparatif terhadap pelaksanaan Pilkada lintas daerah menjadi penting untuk memahami bagaimana konteks lokal mempengaruhi proses demokratisasi dan mengidentifikasi best practices yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur dan Kabupaten Kuantan Singingi di Riau mewakili dua konteks daerah yang berbeda namun sama-sama menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan utama, yaitu bagaimanakah perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi variasi tersebut. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi: (1) Perbedaan tingkat partisipasi politik dalam Pilkada di kedua kabupaten; (2) Variasi dalam kualitas penyelenggaraan Pilkada; (3) Faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pilkada; dan (4) Implikasi perbedaan tersebut terhadap konsolidasi demokrasi lokal.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi guna mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis perbedaan tingkat partisipasi politik dalam Pilkada di kedua kabupaten; (2) Mengevaluasi kualitas penyelenggaraan Pilkada dari aspek transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas; dan (3) Mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap studi demokrasi lokal di Indonesia dan memberikan insights praktis bagi perbaikan sistem elektoral di tingkat daerah.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Studi tentang pelaksanaan Pilkada di Indonesia telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Penelitian yang dilakukan Sarbaini (2020) menganalisis penyelenggaraan Pilkada sebagai perwujudan hak asasi politik masyarakat, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses elektoral (Grossman et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh studi yang dilakukan Solihah & Bainus (2018) menunjukkan bahwa kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada mekanisme penyelenggaraan yang kredibel dan partisipatif.

Dalam konteks partisipasi politik, penelitian yang dilakukan Djuyandi & Herdiansah (2018) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih, khususnya kalangan muda. Studi ini menunjukkan bahwa faktor sosio-demografis dan kualitas kampanye berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi. Sementara itu, penelitian tentang dampak Pilkada terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Zamhasari (2024) mengungkapkan bahwa meskipun Pilkada serentak memberikan efisiensi, namun terdapat tantangan dalam memastikan kualitas demokratis yang optimal.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada juga menjadi perhatian yang serius (Rumesten & Adisti, 2022). Studi yang dilakukan oleh Rahman et al. (2022) mengidentifikasi calon tunggal sebagai indikator krisis kepemimpinan dan ancaman bagi demokrasi lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis komparatif untuk memahami variasi dalam kompetisi politik di tingkat lokal. Penelitian spesifik tentang dinamika politik lokal telah dilakukan terhadap berbagai daerah. Studi tentang dinamika pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2020 yang dilakukan Kaffah et al. (2023) mengungkapkan kompleksitas dalam formasi aliansi politik di tingkat lokal. Di sisi lain, Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Mojokerto pada Pilkada 2024 mengalami penurunan sekitar empat persen dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg (Romadoni, 2024). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan antusiasme politik masyarakat.

Analisis faktor non-elektoral yang berpotensi memicu konflik dalam Pemilu 2024 juga memberikan perspektif penting tentang tantangan penyelenggaraan Pilkada (Donno et al., 2022). Sutisna (2023) memetakan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas dan stabilitas proses elektoral. Meskipun terdapat berbagai studi tentang Pilkada di Indonesia, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang mengkaji secara komparatif pelaksanaan Pilkada antara daerah dengan karakteristik yang berbeda. Kebanyakan studi hanya berfokus pada analisis tunggal atau regional, sementara analisis komparatif lintas daerah dengan latar belakang sosio-politik yang berbeda masih terbatas. Artikel ini mengisi kekosongan dalam literatur dengan menyajikan analisis komparatif mendalam tentang pelaksanaan Pilkada di dua kabupaten dengan karakteristik yang berbeda. Kabupaten Mojokerto yang memiliki tingkat urbanisasi tinggi dan akses informasi yang baik dengan Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki karakteristik geografis yang lebih luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata dan tantangan infrastruktur yang spesifik. Analisis komparatif ini akan memberikan persepsi baru tentang bagaimana konteks lokal mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pilkada.

Demokrasi Lokal

Demokrasi lokal adalah penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat daerah di mana masyarakat punya hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Ini mencakup hak untuk memilih kepala daerah secara langsung, ikut menyampaikan pendapat dalam perumusan kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Demokrasi lokal mendekatkan masyarakat dan pemerintah daerah berada dalam jarak yang lebih dekat, baik secara fisik maupun emosional. Hal ini membuat pemerintah daerah bisa lebih cepat dan tepat merespons kebutuhan serta keinginan warganya. Dengan adanya demokrasi lokal warga bisa merasa lebih didengar dan dilibatkan, sehingga kualitas pelayanan publik dan kepercayaan terhadap pemerintah juga dapat meningkat (Fikri & Adytyas, 2018).

Pelaksanaan demokrasi lokal di Indonesia setelah era reformasi ditandai dengan proses desentralisasi yaitu pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Salah satu bentuk nyata dari desentralisasi ini adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat.

Pilkada menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mereka percayai, sekaligus memberikan legitimasi demokratis dan memperkuat hubungan akuntabilitas antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kualitas demokrasi lokal dapat dilihat dari beberapa hal, seperti seberapa tinggi partisipasi pemilih, adanya persaingan sehat antar calon, keterbukaan proses pemilihan, serta sejauh mana pemerintah daerah merespons kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta dapat meninjau apakah proses pemilihan berlangsung secara langsung, bebas, dan rahasia, serta apakah terdapat indikasi kecurangan, intimidasi, atau pengaruh kuat dari oligarki lokal.

Dalam kajian perbandingan antara Pilkada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi, analisis terhadap demokrasi lokal akan membantu menjelaskan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing wilayah berpengaruh terhadap praktik demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pilkada di kedua daerah tersebut. Sehingga teori demokrasi ini juga membuka ruang untuk mengeksplorasi perbedaan budaya politik lokal yang mungkin mempengaruhi kualitas partisipasi dan hasil pemilihan. Demokrasi yang sehat idealnya menjamin bahwa rakyat memiliki kendali atas kepemimpinan mereka dan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak mayoritas warga.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Keterlibatan ini bisa dilakukan secara langsung seperti memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), maupun secara tidak langsung misalnya dengan menghadiri kampanye, bergabung dalam partai politik atau menyuarakan pendapat melalui media dan forum publik. Dalam pilkada, partisipasi politik masyarakat menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana warga merasa berdaya dan percaya bahwa suara mereka dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah daerah. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa demokrasi berjalan sehat, karena rakyat terlibat aktif dalam menentukan pemimpinnya dan arah pembangunan daerah (Iqbal, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada. Dari sisi sosial, hal-hal seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan hubungan sosial antar warga sangat berpengaruh. Semakin tinggi pendidikan dan kesejahteraan seseorang biasanya semakin besar juga kemauannya untuk terlibat dalam politik. Dari sisi psikologis, rasa percaya diri bahwa suara mereka penting (efikasi politik) dan kepercayaan terhadap sistem pemerintahan juga menentukan apakah seseorang akan ikut memilih atau tidak. Selain itu, faktor-faktor kelembagaan seperti bagaimana kualitas penyelenggaraan Pilkada, mudah atau tidaknya akses informasi politik, dan adanya dukungan dari organisasi masyarakat sipil juga sangat penting. Dengan menganalisis pola partisipasi ini, kita bisa melihat seberapa sadar masyarakat terhadap hak politiknya, sekaligus menilai seberapa matang demokrasi di suatu daerah.

Dalam studi komparatif Pilkada antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi, analisis terhadap partisipasi politik masyarakat menjadi kunci untuk memahami sejauh mana warga terlibat dalam proses demokrasi di masing-masing daerah. Dengan membandingkan tingkat keikutsertaan dalam pemilu, pola perilaku pemilih, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika politik lokal. Hasil analisis ini juga akan menunjukkan seberapa efektif mekanisme demokrasi di tiap daerah dalam menyerap dan menanggapi aspirasi masyarakat.

Desentralisasi/Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah memberikan hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan prinsip otonomi

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Gagasan ini muncul dari keyakinan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat setempat dan karena itu dianggap lebih mampu memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran (Sarkawi, 2017). Otonomi ini mencakup kewenangan membuat kebijakan (legislatif), menjalankannya (eksekutif), dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Setelah era reformasi, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berkembang pesat melalui berbagai peraturan yang mengatur pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Pilkada langsung menjadi salah satu wujud penting dari pelaksanaan otonomi ini, karena memberi masyarakat kesempatan untuk memilih kepala daerah secara langsung. Kepala daerah yang terpilih mendapatkan legitimasi dari rakyat dan memiliki keleluasaan untuk menggunakan kewenangannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam pilkada dapat diukur dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara demokratis, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan lokal. Dalam hal ini, pelaksanaan pilkada menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penggunaan kewenangan otonomi oleh pemerintah daerah. Melalui analisis komparatif terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana masing-masing daerah memanfaatkan kewenangan otonominya. Hal ini mencakup pengaturan regulasi lokal, pengelolaan anggaran, serta koordinasi antar pemangku kepentingan guna memastikan proses pemilihan berjalan dengan baik dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal.

Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Prinsip ini menuntut adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penegakan supremasi hukum, keterbukaan informasi publik, serta keberfungsian sistem checks and balances. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) prinsip *good governance* harus diterapkan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa, guna menjamin legitimasi proses demokrasi di tingkat lokal (Z. Putra & Umpi, 2024).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pilkada dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti penyediaan akses informasi yang transparan kepada publik, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Selain itu, profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilihan juga menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan pilkada berlangsung jujur dan adil. Responsifnya institusi penyelenggara terhadap keluhan serta masukan publik turut menjadi indikator penting dalam menciptakan proses pemilihan yang berkualitas.

Melalui analisis komparatif terhadap pelaksanaan pilkada di Kabupaten Mojokerto dan Kuantan Singingi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dapat dievaluasi secara menyeluruh dengan pendekatan ini. Perbandingan terhadap aspek seperti transparansi dalam penyelenggaraan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan sejauh mana respons terhadap aspirasi publik dijalankan, serta dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola pemilihan ke depan. Dengan demikian, penelitian ini juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal secara berkelanjutan

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menganalisis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan komparatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan Pilkada di kedua daerah yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosio-ekonomi yang berbeda. Desain ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada di tingkat lokal. Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Penggunaan data sekunder dipilih karena memungkinkan akses terhadap informasi yang komprehensif dan terverifikasi tentang pelaksanaan Pilkada di kedua kabupaten. Data sekunder juga memberikan keunggulan dalam hal objektivitas dan dapat diverifikasi ulang oleh peneliti lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Profil Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 969,36 km² dan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 1,1 juta jiwa. Wilayah ini terdiri atas 18 kecamatan, 5 kelurahan, dan 299 desa, dengan tingkat kepadatan penduduk yang terbilang cukup tinggi (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto, 2023). Perekonomian daerah sebagian besar ditopang oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa, mencerminkan tingkat urbanisasi yang cukup signifikan. Dari sisi pelayanan publik, infrastruktur pendidikan dan kesehatan tergolong cukup memadai, didukung dengan akses informasi yang baik melalui berbagai saluran komunikasi dan media massa (Budianto, 2024).

Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 7.656,03 km² dan jumlah penduduk sekitar 360.581 jiwa. Wilayah ini terdiri dari 15 kecamatan, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat. Perekonomian daerah ini bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi. Beberapa sumber daya alam yang ditemukan di daerah ini antara lain emas, batu gamping, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu (pasir batu), mangan, kaolin, dan suntan (Kabupaten Kuantan Singingi, 2025). Kabupaten Kuantan Singingi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan terutama di bidang infrastruktur dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan akses informasi (Kabupaten Kuantan Singingi, 2023). Dibandingkan dengan daerah yang lebih maju seperti Kabupaten Mojokerto, akses masyarakat terhadap fasilitas tersebut masih terbatas.

Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata dari keterlibatan warga dalam proses demokrasi di tingkat lokal. Melalui partisipasi ini, masyarakat ikut menentukan arah pembangunan dan kebijakan daerah dengan memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan serta aspirasi mereka (Andrias, 2023). Perbedaan tingkat partisipasi dari daerah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut

a. Kabupaten Mojokerto

Tabel 1. Tingkat Partisipasi di Kabupaten Mojokerto

No	Tahun	Tingkat Partisipasi
1.	2015	60%
2.	2020	78,78%
3.	2024	86.67%

Sumber: KPU Kabupaten Mojokerto, (2024)

Berdasarkan data partisipasi Pilkada di Kabupaten Mojokerto dalam tiga periode terakhir terlihat adanya tren peningkatan yang positif dan konsisten dalam keterlibatan masyarakat. Pada Pilkada tahun 2015, tingkat partisipasi masih berada di angka 60%. Angka ini tergolong cukup baik sebagai titik awal, namun juga menunjukkan bahwa masih banyak warga yang belum sepenuhnya terlibat dalam proses politik lokal. Namun, kesadaran politik masyarakat meningkat signifikan pada tahun 2020, ketika partisipasi melonjak menjadi 78,78%. Kenaikan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peran suara dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Tren ini terus berlanjut di tahun 2024 dengan partisipasi mencapai 86,67%, menjadi bukti bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi semakin kuat dan berkelanjutan (Cahya, 2025).

Secara keseluruhan, dalam kurun waktu sembilan tahun dari 2015 hingga 2024, Kabupaten Mojokerto menunjukkan kemajuan yang sangat tinggi dalam hal partisipasi Pilkada. Tingkat partisipasi meningkat sebesar 26,67 poin persentase, atau naik 44,5% dari angka awal. Pada tahun 2024, partisipasi mencapai 86,67%, sebuah pencapaian yang tidak hanya menunjukkan kesadaran politik masyarakat yang semakin tinggi, tetapi juga menempatkan Mojokerto sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi secara nasional bahkan melebihi rata-rata partisipasi Pilkada di Indonesia yang biasanya berada di kisaran 70–80%. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa berbagai upaya sistematis untuk mendorong partisipasi politik telah memberikan hasil yang nyata. Masyarakat Mojokerto kini telah mengalami perubahan sikap, dari yang sebelumnya cenderung kurang aktif menjadi semakin antusias dalam mengikuti proses demokrasi lokal. Kenaikan partisipasi yang berlangsung secara stabil dan terus-menerus juga menandakan bahwa faktor-faktor pendorongnya bukan sekadar bersifat sementara, melainkan sudah mulai menjadi bagian dari budaya politik masyarakat setempat.

Tren positif yang terlihat dari data partisipasi Pilkada mencerminkan kemajuan dalam perkembangan demokrasi lokal di Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan peran penting mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kenaikan partisipasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti program sosialisasi dan pendidikan politik yang efektif dari KPU dan berbagai pihak terkait, semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi politik melalui media sosial dan platform digital, serta meningkatnya kepercayaan terhadap proses pemilu yang dianggap lebih jujur dan transparan. Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti meningkatnya pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan teknologi juga berperan dalam membentuk kesadaran politik masyarakat. Kompetisi antar calon yang lebih terbuka dan berkualitas juga membuat pemilih lebih tertarik untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya. Kenaikan partisipasi pemilih yang terus berlanjut di Kabupaten Mojokerto membawa dampak baik bagi demokrasi dan jalannya pemerintahan.

Ketika banyak warga ikut memilih, pemimpin yang terpilih akan memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat. Tingginya angka partisipasi sebesar 86,67% pada Pilkada 2024 menunjukkan bahwa pemilu di Mojokerto tidak hanya berjalan sesuai aturan, tetapi juga berhasil menarik perhatian dan keikutsertaan masyarakat (Aliandu, 2024). Hal ini bisa mendorong terbentuknya pemerintahan yang lebih peduli dan bertanggung jawab. Ke depannya, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menjaga semangat partisipasi ini, melalui pendekatan sosialisasi politik yang lebih inovatif, memperkuat transparansi dalam setiap tahapan pemilu, dan memastikan akses yang setara bagi semua warga untuk ikut berpartisipasi. Dengan langkah-langkah tersebut, demokrasi lokal di Mojokerto dapat terus berkembang dan menjadi contoh baik bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

b. Kabupaten Kuantan Singingi

Tabel 2. Tingkat Partisipasi di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Tahun	Tingkat Partisipasi
1.	2015	73,85%
2.	2020	67,41%
3.	2024	76,76%

Sumber: KPU Kabupaten Kuantan Singingi, (2024)

Berdasarkan data partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Kuantan Singingi selama tahun 2015 hingga 2024 terlihat adanya perubahan naik turun dalam tingkat keikutsertaan masyarakat. Pada Pilkada tahun 2015 partisipasi masyarakat tercatat sebesar 73,85%. Angka ini bisa dianggap cukup baik, terutama jika dibandingkan dengan rata-rata partisipasi Pilkada di Indonesia yang biasanya berada di kisaran 60–80%. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kuantan Singingi memiliki minat yang cukup besar terhadap proses demokrasi di daerah mereka. Hal ini juga menjadi tanda bahwa kesadaran politik warga cukup tinggi dan mereka percaya pada sistem pemilihan yang ada. Selain itu, keberhasilan ini didukung oleh upaya sosialisasi dan edukasi politik yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti KPU, partai politik, dan organisasi masyarakat.

Namun, pada Pilkada tahun 2020, terjadi penurunan partisipasi yang cukup besar. Tingkat partisipasi pemilih turun menjadi 67,41%, atau berkurang sekitar 6,44 persen dibandingkan tahun 2015 (Susandi, 2020). Penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2020 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena pandemi COVID-19. Saat itu banyak orang merasa khawatir datang ke tempat pemungutan suara karena aturan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, pandemi juga mengubah situasi sosial dan politik secara umum. Faktor lain yang mungkin memengaruhi adalah rasa tidak puas masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebelumnya, kurang menariknya calon yang maju, atau isu politik lokal yang tidak banyak mendapat perhatian. Kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi juga membuat sebagian warga lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada ikut serta dalam pemilu. Meski partisipasi menurun menjadi 67,41%, angka ini masih dalam batas normal untuk ukuran nasional. Namun, hal ini tetap menjadi perhatian penting bagi semua pihak agar kedepan bisa meningkatkan kembali partisipasi masyarakat.

Pada Pilkada 2024 terjadi peningkatan dalam partisipasi masyarakat. Angkanya naik menjadi 76,76%, bahkan lebih tinggi dari tahun 2015. Kenaikan sebesar 9,35 poin ini menunjukkan bahwa masyarakat Kuantan Singingi kembali bersemangat untuk ikut

memilih. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti kesadaran politik yang semakin tinggi setelah masa pandemi, munculnya calon-calon pemimpin yang dianggap berkualitas dan membawa program yang sesuai dengan kebutuhan warga, serta kampanye dan sosialisasi yang efektif terutama lewat media sosial dan teknologi digital, serta keberhasilan KPU dan pihak terkait dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pulihnya kondisi ekonomi juga membuat masyarakat lebih siap dan punya waktu untuk berpartisipasi. Kemudahan akses informasi lewat internet juga mungkin membantu warga lebih paham dan tertarik untuk ikut dalam proses pemilihan.

Secara keseluruhan partisipasi pemilih dalam Pilkada di Kabupaten Kuantan Singingi selama sembilan tahun terakhir membentuk pola seperti huruf "V". Setelah turun pada tahun 2020, jumlah pemilih yang ikut memilih kembali meningkat pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa bangkit kembali dan tetap peduli terhadap proses demokrasi, meskipun sebelumnya sempat menghadapi kesulitan seperti pandemi. Angka partisipasi yang tinggi di tahun 2024 juga menjadi bukti bahwa warga benar-benar peduli terhadap masa depan daerahnya dan mereka yakin bahwa suara mereka penting dalam menentukan arah pembangunan. Ini menjadi tanda baik bagi perkembangan demokrasi lokal, sekaligus memberi kekuatan dan kepercayaan yang besar bagi pemimpin yang terpilih untuk menjalankan program-programnya. Tren peningkatan partisipasi ini memberi harapan bahwa demokrasi di Kuantan Singingi semakin matang, dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya ikut serta dalam politik. Ke depan, tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan semangat ini dan terus mencari cara baru agar partisipasi masyarakat tetap tinggi dalam pemilu berikutnya.

Kualitas Penyelenggaraan Pilkada antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi

Kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi salah satu indikator utama untuk menilai sejauh mana demokrasi lokal berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pilkada bukan hanya sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga cerminan dari kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, transparansi dalam setiap tahapan pemilu, serta akuntabilitas lembaga penyelenggara (Ristyawati & Saraswati, 2018). Jika dibandingkan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi, keduanya menunjukkan dinamika partisipasi pemilih yang berbeda, namun tetap mencerminkan bahwa proses demokrasi di tingkat daerah mengalami perkembangan.

a. Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, terlihat adanya peningkatan tingkat partisipasi pemilih yang signifikan dan konsisten dalam tiga periode Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terakhir. Pada tahun 2015, partisipasi masyarakat berada pada angka 60%, kemudian mengalami lonjakan tajam menjadi 78,78% pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga mencapai 86,67% pada Pilkada tahun 2024. Peningkatan sebesar 26,67 poin persentase atau sekitar 44,5% dalam sembilan tahun ini merupakan pencapaian yang sangat positif dalam keterlibatan politik masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini, peningkatan partisipasi ini tidak hanya mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi lokal, tetapi juga menunjukkan tumbuhnya kesadaran politik serta rasa tanggung jawab warga dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Tingkat partisipasi sebesar 86,67% pada Pilkada tahun 2024 menjadikan Kabupaten Mojokerto melampaui rata-rata nasional, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu daerah dengan partisipasi pemilih tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan jumlah pemilih yang ikut serta dalam Pilkada Mojokerto tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari serangkaian upaya strategis dan terencana yang melibatkan berbagai pihak, seperti penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga institusi pendidikan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan secara intensif melalui berbagai cara, seperti kunjungan langsung ke masyarakat, diskusi publik, seminar, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau pemilih muda. Keterbukaan informasi mengenai calon kepala daerah melalui media digital juga memudahkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang lebih bijak dan rasional. Di sisi lain, peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilu, mulai dari logistik yang lebih baik, pelatihan petugas, hingga penggunaan teknologi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu yang jujur dan transparan. Tingginya kualitas persaingan antar calon kepala daerah, yang ditunjukkan melalui penyampaian program kerja yang jelas dan visi pembangunan yang konkret menjadi salah satu faktor penting yang mendorong partisipasi pemilih (Akili & Achmad, 2023). Masyarakat merasa bahwa suara mereka benar-benar memiliki pengaruh dalam menentukan pemimpin yang mampu membawa kemajuan bagi daerah. Hal ini membuat pemilih lebih yakin bahwa keputusan mereka akan berdampak langsung pada arah pembangunan ke depan.

Peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan Pilkada di daerah ini berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pemilu yang dinilai jujur, adil, dan dapat dipercaya. Minimnya sengketa atau gugatan hasil pemilu serta dukungan dari berbagai pihak menjadi bukti bahwa proses demokrasi berlangsung secara kredibel. Keberhasilan Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi ini bisa menjadi contoh positif bagi daerah lain, menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat, komitmen bersama, dan kolaborasi lintas sektor, partisipasi politik masyarakat dapat ditingkatkan secara konsisten untuk membentuk pemerintahan yang lebih responsif dan mewakili aspirasi rakyat.

b. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi mengalami pola partisipasi pemilih yang naik-turun selama periode 2015 hingga 2024, yang mencerminkan dinamika sosial dan politik yang cukup kompleks di daerah tersebut. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 tercatat sebesar 73,85%, angka yang tergolong baik untuk wilayah kabupaten. Namun, partisipasi ini menurun pada Pilkada 2020 menjadi 67,41%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi pandemi COVID-19. Meski demikian, tren tersebut kembali membaik pada tahun 2024, ketika tingkat partisipasi melonjak menjadi 76,76%. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kuantan Singingi mampu beradaptasi dan bangkit dari situasi sulit, serta tetap menjaga semangat dalam berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di tingkat lokal.

Penurunan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dipahami sebagai dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang saat itu melanda Indonesia dan dunia. Kekhawatiran masyarakat terhadap risiko penularan virus membuat banyak orang enggan datang ke tempat pemungutan suara. Selain itu, pembatasan sosial, protokol kesehatan yang ketat, dan terbatasnya kegiatan kampanye tatap muka juga menyulitkan proses sosialisasi politik (Herawati et al., 2023). Di sisi lain, kondisi ekonomi yang memburuk selama pandemi mendorong masyarakat untuk lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari daripada urusan politik. Faktor-faktor ini secara keseluruhan menurunkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa situasi darurat seperti pandemi dapat mempengaruhi secara langsung partisipasi demokratis masyarakat di tingkat lokal. Adanya peningkatan partisipasi pemilih yang mencapai 76,76% pada Pilkada 2024 menjadi tanda kebangkitan yang sangat positif.

Angka ini tidak hanya menunjukkan pemulihan dari penurunan di tahun 2020, tetapi bahkan melampaui partisipasi pada tahun 2015. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kuantan Singingi memiliki semangat dan ketahanan politik yang kuat. Kenaikan ini juga menunjukkan adanya faktor-faktor pendukung yang berhasil meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, seperti perbaikan dalam sosialisasi politik, hadirnya calon-calon yang lebih menarik, serta pulihnya kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi. Dalam hal ini menjadi tanda yang baik bahwa kesadaran politik masyarakat Kuantan Singingi tidak hanya kembali pulih setelah pandemi, tetapi juga semakin kuat.

Beberapa hal yang ikut mendorong peningkatan partisipasi ini antara lain adalah membaiknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setelah masa krisis, hadirnya calon kepala daerah yang dinilai lebih kredibel dan mewakili kepentingan warga, serta penggunaan strategi kampanye yang lebih modern dan berbasis digital (Yakub & Armunanto, 2022). Pendekatan kampanye ini dinilai berhasil menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membuat proses Pilkada terasa lebih dekat dan relevan bagi semua kalangan. Meskipun angka partisipasi sebesar 76,76% pada Pilkada 2024 belum menyamai capaian Kabupaten Mojokerto, angka ini tetap tergolong tinggi karena berada di atas rata-rata nasional. Pencapaian tersebut patut diapresiasi sebagai tanda bahwa kualitas penyelenggaraan Pilkada di Kuantan Singingi cukup baik, serta mencerminkan semangat demokrasi lokal yang terus tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Perbandingan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan perbedaan karakteristik dalam partisipasi pemilih. Kabupaten Mojokerto menampilkan tren peningkatan yang stabil dari waktu ke waktu. Hal ini mencerminkan tata kelola pemilu yang tertata, budaya politik yang semakin maju, serta sistem demokrasi lokal yang sudah cukup matang (Veenhof et al., 2025). Sementara itu, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan pola partisipasi yang naik turun. Meski begitu, daerah ini tetap menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dan pulih dari tantangan yang ada. Hal ini menandakan bahwa kualitas penyelenggaraan Pilkada di Kuantan Singingi tetap terjaga berkat kolaborasi antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan para aktor politik lokal.

Dari daerah Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi dapat menjadi contoh bagaimana penyelenggaraan Pilkada yang berkualitas membutuhkan kerja sama dari banyak pihak mulai dari lembaga penyelenggara yang profesional, partisipasi masyarakat yang tinggi, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi. Kabupaten Mojokerto menunjukkan pola partisipasi yang stabil dan positif, mencerminkan masyarakat yang semakin sadar dan aktif dalam demokrasi lokal. Sementara itu, Kabupaten Kuantan Singingi memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah daerah dapat bangkit dan membangun kembali partisipasi politik setelah mengalami krisis besar seperti pandemi. Ke depan, tantangan bagi kedua daerah adalah menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada, tidak hanya dari sisi jumlah partisipasi, tetapi juga dalam hal keadilan, representasi yang setara, dan efisiensi proses pemilu. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat benar-benar menjadi cerminan kehendak rakyat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pilkada

a. Faktor Geografis

1. Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah sekitar 969,36 km² dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Secara geografis, wilayah ini tergolong datar dan memiliki jaringan transportasi serta infrastruktur jalan yang cukup baik, sehingga distribusi logistik Pilkada relatif tidak mengalami hambatan (Nugroho et al., 2024). Aksesibilitas ini memungkinkan seluruh elemen pelaksanaan pemilu baik

petugas, perlengkapan, maupun pemilih dapat menjangkau Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mudah dan tepat waktu. Keadaan ini mendukung kelancaran tahapan Pilkada, mulai dari pendistribusian logistik hingga pelaporan hasil penghitungan suara.

Wilayah Mojokerto yang dekat dengan pusat-pusat ekonomi dan pemerintahan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi politik dan kampanye para calon kepala daerah. Media sosial, siaran televisi, radio lokal, dan forum diskusi publik bisa diakses dengan mudah oleh warga, sehingga edukasi politik dapat dijalankan secara merata. Faktor ini berdampak positif pada meningkatnya kualitas partisipasi pemilih, karena warga mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan secara rasional. Dalam hal ini, kondisi geografis turut memperkuat kualitas demokrasi lokal karena mendukung persebaran informasi dan interaksi antara kandidat dengan konstituen.

Selain itu, wilayah Mojokerto memiliki kedekatan geografis antar kecamatan dan desa yang membuat koordinasi antar penyelenggara pemilu lebih efisien. Saat terjadi kendala di lapangan, respons dari panitia pemilihan kecamatan maupun kabupaten dapat diberikan secara cepat karena medan tempuh tidak menyulitkan. Dengan sistem komunikasi dan transportasi yang mendukung, Mojokerto mampu menjaga ketertiban dan efisiensi waktu dalam seluruh proses Pilkada. Ini menegaskan bahwa wilayah dengan kondisi geografis yang mendukung dapat mengurangi potensi gangguan teknis dan administratif selama pemilu berlangsung.

2. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi di Provinsi Riau memiliki luas wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan Mojokerto, yakni sekitar 7.656,03 km², dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit dan tersebar di daerah yang terpisah oleh sungai, hutan, serta perbukitan. Kondisi geografis ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama pada aspek mobilisasi logistik dan distribusi informasi. Beberapa desa di kabupaten ini berada di lokasi terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan transportasi air atau jalan tanah yang rusak saat musim hujan (Ardipandanto, 2021). Situasi ini menyebabkan keterlambatan distribusi perlengkapan pemilu dan kesulitan dalam menjangkau seluruh pemilih secara merata.

Akses informasi politik di Kuantan Singingi juga terhambat oleh keterbatasan jaringan komunikasi dan minimnya infrastruktur teknologi. Beberapa wilayah belum tersentuh oleh jaringan internet yang stabil, sehingga kampanye digital tidak bisa dilakukan secara maksimal. Masyarakat di daerah terpencil lebih mengandalkan komunikasi langsung atau pertemuan tatap muka yang sering kali tidak menjangkau semua lapisan warga. Keterbatasan ini membuat sebagian pemilih kurang memahami profil calon dan program kerja yang ditawarkan, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas partisipasi mereka dalam Pilkada.

Kondisi geografis yang menantang juga mempersulit pengawasan dan pengendalian oleh penyelenggara pemilu (Warganegara et al., 2023). Ketika terjadi masalah di TPS yang terletak jauh dari pusat kabupaten atau kecamatan, proses penanganan menjadi lambat dan tidak jarang membutuhkan koordinasi yang lebih rumit. Keterlambatan ini dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses pemilu dan membuka celah bagi terjadinya pelanggaran yang tidak cepat ditindak. Dengan demikian, kendala geografis secara langsung mempengaruhi akurasi, transparansi, dan legitimasi hasil Pilkada di Kuantan Singingi.

Jumlah dan distribusi TPS di Kuantan Singingi juga turut dipengaruhi oleh kondisi geografis. Banyak wilayah yang hanya memiliki satu TPS dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari pemukiman warga, sehingga pemilih harus menempuh perjalanan yang sulit untuk memberikan suara. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat partisipasi,

terutama dari kelompok rentan seperti lansia dan warga di wilayah pedalaman. Kondisi ini berbeda jauh dengan Mojokerto yang memiliki persebaran TPS lebih merata dan mudah dijangkau. Oleh karena itu, faktor geografis di Kuantan Singingi menjadi hambatan signifikan dalam menjamin kesetaraan akses warga terhadap hak pilih mereka.

Dengan melihat kondisi dua kabupaten ini, jelas bahwa faktor geografis bukan hanya soal letak dan bentuk wilayah, tetapi juga mencerminkan bagaimana seluruh aspek teknis, logistik, informasi, dan partisipasi publik dalam Pilkada dipengaruhi secara langsung (Riewanto, 2020). Kabupaten Mojokerto mendapat keuntungan dari kondisi geografis yang mendukung, sedangkan Kuantan Singingi masih harus menghadapi tantangan besar dalam menjangkau seluruh warganya secara setara dalam proses demokrasi lokal.

b. Faktor Sosial Ekonomi

1. Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto memiliki struktur ekonomi yang cukup beragam dengan dominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Keberadaan kawasan industri yang berkembang pesat di beberapa kecamatan ikut mendorong perputaran ekonomi masyarakat (Sudarmanto et al., 2024). Pendapatan daerah yang stabil dari sektor-sektor ini memungkinkan pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk mengalokasikan anggaran pemilu secara lebih efisien dan merata. Kegiatan Pilkada, mulai dari logistik hingga sosialisasi, dapat dijalankan dengan dukungan keuangan yang mencukupi, sehingga tidak banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Selain itu, masyarakat yang aktif secara ekonomi cenderung lebih mudah dijangkau dan dilibatkan dalam agenda demokrasi karena mereka lebih sering berinteraksi dengan layanan dan informasi publik. Kondisi ini mendukung terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya memilih pemimpin daerah yang kredibel.

Kegiatan ekonomi yang berkembang juga berdampak pada tingkat pendidikan dan akses informasi di Mojokerto. Masyarakat yang memiliki pendapatan tetap atau bekerja di sektor formal lebih banyak mengakses media informasi dan mengikuti perkembangan politik daerah. Hal ini memberikan pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi karena pemilih merasa bahwa pilihan mereka akan berdampak langsung pada kondisi ekonomi yang mereka rasakan. Ketika masyarakat memiliki harapan bahwa pemimpin daerah dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, maka keterlibatan mereka dalam Pilkada cenderung meningkat. Dalam konteks Mojokerto, partisipasi yang tinggi dapat dikaitkan dengan ekspektasi ekonomi yang realistis dari pemilih terhadap pemimpin yang akan datang. Hubungan antara stabilitas ekonomi dan partisipasi politik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal ikut mendorong keterlibatan warga dalam proses demokrasi.

Distribusi anggaran pemilu di Mojokerto relatif lancar karena didukung oleh sistem administrasi yang baik dan kondisi fiskal daerah yang stabil. Biaya untuk pelatihan petugas, penyediaan alat pemilu, serta kampanye informasi dapat dicairkan tanpa hambatan besar. Pemerintah daerah juga memiliki kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan non-elektoral seperti pendidikan pemilih dan forum warga. Ini menjadi penting karena kegiatan-kegiatan semacam itu turut memperkuat kualitas demokrasi lokal secara menyeluruh (McDonnell, 2020). Dalam hal ini, kondisi ekonomi Mojokerto memungkinkan terjadinya penyelenggaraan Pilkada yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam membentuk keterlibatan warga. Infrastruktur ekonomi turut mendorong efektivitas setiap tahapan pemilu, dari perencanaan hingga evaluasi.

Ekonomi yang kuat juga menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil, yang pada gilirannya mendukung suasana kondusif dalam pelaksanaan Pilkada. Ketika masyarakat tidak terbebani oleh persoalan ekonomi mendesak, mereka lebih mungkin terlibat dalam kegiatan politik, baik sebagai pemilih maupun pengawas independen. Stabilitas ini menekan potensi konflik dan memperkecil kemungkinan praktik-praktik yang menyimpang seperti politik uang secara masif. Meskipun praktik tersebut tidak sepenuhnya hilang, kontrol sosial dalam masyarakat ekonomi mapan cenderung lebih tinggi (Pia & Jahroh, 2024). Dengan demikian, Mojokerto menjadi contoh daerah di mana kekuatan ekonomi daerah turut menentukan kualitas pemilihan kepala daerah secara keseluruhan.

2. Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ketergantungan terhadap komoditas primer seperti kelapa sawit dan karet menjadikan perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga pasar. Kondisi ini mempengaruhi daya beli masyarakat dan tingkat kesejahteraan secara umum, yang secara tidak langsung berdampak pada antusiasme warga dalam mengikuti Pilkada. Ketika ekonomi melemah, sebagian warga lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar daripada mengikuti dinamika politik (Jayuska & Wijaya, 2020). Hal ini terlihat dalam fluktuasi partisipasi pemilih yang turun naik dalam tiga periode Pilkada terakhir. Pilkada kerap dipandang sebagai urusan elite, bukan sebagai sarana strategis untuk mendorong perubahan ekonomi.

Keterbatasan fiskal daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada. Alokasi anggaran yang terbatas mempengaruhi kemampuan penyelenggara dalam menjangkau wilayah-wilayah pelosok dengan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Banyak program sosialisasi yang tidak dapat dilakukan secara optimal karena keterbatasan biaya transportasi dan logistik. Hal ini membuat penyebaran informasi mengenai pemilu tidak merata, khususnya di daerah pedalaman. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak memahami pentingnya menggunakan hak pilih secara sadar. Dalam konteks ini, kondisi ekonomi yang belum stabil berdampak langsung pada efektivitas tahapan-tahapan Pilkada, terutama pada aspek partisipasi dan pemerataan akses informasi.

Selain itu, pengaruh ekonomi juga tercermin dari masih kuatnya praktik politik uang di beberapa wilayah Kuantan Singingi (H. P. Putra, 2025). Ketika kesejahteraan masyarakat rendah, kerentanan terhadap politik transaksional meningkat. Pemilih mudah terpengaruh oleh tawaran materi karena kebutuhan ekonomi mendesak. Fenomena ini memperlemah prinsip demokrasi dan menggeser orientasi pemilihan dari program kerja ke kepentingan jangka pendek. Ini tentu menjadi hambatan serius dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Di tengah kondisi seperti ini, penyelenggara pemilu menghadapi dilema antara menjalankan proses yang bersih dan menghadapi realitas sosial ekonomi yang kurang mendukung.

Kegiatan ekonomi yang masih bersifat informal dan tersebar secara sporadis juga menyulitkan pelibatan komunitas dalam kegiatan politik. Tidak seperti Mojokerto yang memiliki struktur komunitas formal seperti serikat pekerja atau organisasi industri, masyarakat Kuantan Singingi lebih banyak bekerja secara individual di sektor pertanian atau perkebunan keluarga. Kondisi ini membuat mobilisasi massa untuk kegiatan politik menjadi lebih sulit karena tidak ada simpul sosial yang kuat untuk dijadikan penghubung. Dalam situasi ini, strategi pelibatan masyarakat harus dilakukan secara kontekstual dan mendekati komunitas secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan

yang berhasil di daerah ekonomi maju tidak selalu dapat diterapkan di daerah dengan karakter ekonomi tradisional seperti Kuantan Singingi.

c. Faktor Kelembagaan

1. Kabupaten Mojokerto

Lembaga penyelenggara pemilu di Kabupaten Mojokerto menunjukkan kinerja yang konsisten dalam mengelola setiap tahapan Pilkada (Hidayat & Febriansyah, 2024). KPU setempat memiliki sistem kerja yang tertata dengan baik dan mampu membangun koordinasi yang solid dengan Bawaslu, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan. Pengalaman panjang dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya menjadi modal penting bagi Mojokerto untuk meningkatkan profesionalisme kelembagaan. Pelatihan bagi petugas lapangan, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen data, dan kesiapan logistik dijalankan secara terstruktur dan tepat waktu. Selain itu, komunikasi antar lembaga juga berjalan lancar sehingga persoalan teknis bisa diselesaikan lebih cepat tanpa menimbulkan gejolak. Kesiapan kelembagaan yang kuat ini mencerminkan peran strategis birokrasi lokal dalam menjaga integritas proses Pilkada.

Hubungan yang harmonis antara KPU, Bawaslu, dan unsur pemerintah daerah turut menciptakan iklim kerja yang stabil selama masa persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Tidak banyak laporan konflik antar institusi atau ketidaksesuaian dalam penerapan aturan teknis di lapangan. Kelembagaan yang berjalan sesuai tupoksi mendorong lahirnya pemilu yang lebih tertib dan akuntabel. Kehadiran forum koordinasi reguler antar lembaga membuat proses pengambilan keputusan bisa dilakukan secara kolektif dan terbuka (Steytler, 2021). Transparansi dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kegiatan juga menjadi bagian penting dari penguatan kelembagaan di Mojokerto. Semua unsur pelaksana memiliki peran jelas dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama.

Keberadaan sistem pengawasan yang aktif di Mojokerto membantu memperkuat pengendalian terhadap potensi pelanggaran. Bawaslu sebagai lembaga pengawas tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan formal, tetapi juga membangun pendekatan edukatif kepada masyarakat. Mereka melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan mahasiswa untuk ikut memantau jalannya Pilkada di lapangan. Hal ini menjadikan proses pengawasan tidak kaku, namun tetap berwibawa dan menyentuh akar permasalahan. Dukungan dari masyarakat terhadap lembaga pemilu menciptakan legitimasi yang tinggi terhadap hasil pemilihan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan tidak hanya bergantung pada internal lembaga, tetapi juga pada partisipasi publik yang terstruktur.

KPU Mojokerto juga cukup adaptif dalam menjawab tantangan-tantangan baru seperti digitalisasi dan penyebaran hoaks. Mereka menggunakan media sosial secara aktif untuk memberikan klarifikasi, mengumumkan tahapan penting, dan membangun kepercayaan publik. Pendekatan yang lebih terbuka ini menjadikan KPU sebagai institusi yang tidak hanya administratif, tetapi juga komunikatif. Penyesuaian sistem kerja yang cepat terhadap perubahan dinamika membuat kelembagaan di Mojokerto tetap relevan dan efisien dalam menjalankan fungsinya. Dengan kondisi ini, Mojokerto mampu menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang rapi dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan Pilkada yang bersih dan berintegritas.

2. Kabupaten Kuantan Singingi

Kelembagaan penyelenggara pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama dalam hal koordinasi dan efisiensi kerja antar instansi. Luas wilayah yang besar dan medan yang sulit membuat distribusi logistik dan supervisi menjadi lebih lambat. KPU daerah harus mengatur strategi yang berbeda untuk

menjangkau wilayah-wilayah terpencil dengan sumber daya yang terbatas (Nashrullah, 2023). Kondisi ini membuat beberapa tahapan Pilkada berisiko mengalami keterlambatan jika tidak diantisipasi secara matang. Koordinasi antar penyelenggara sering kali tidak berjalan lancar karena keterbatasan akses dan komunikasi. Masalah teknis di lapangan kadang baru terdeteksi ketika sudah menimbulkan dampak, karena pengawasan belum merata ke seluruh titik.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala kelembagaan yang cukup mencolok di Kuantan Singingi. Tidak semua petugas di tingkat bawah memiliki pelatihan yang memadai dalam mengelola proses pemilu. Beberapa TPS yang berada di daerah terpencil mengalami kekurangan tenaga atau petugas tidak memahami prosedur secara utuh. Hal ini berdampak pada ketidakteraturan proses di lapangan dan meningkatkan potensi kesalahan teknis (Hysi et al., 2024). KPU setempat berusaha menanggulangi dengan mengadakan pelatihan, namun cakupannya belum merata karena keterbatasan anggaran dan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kapasitas personal yang bertugas di setiap jenjang.

Dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah belum optimal dalam menyokong tugas KPU dan Bawaslu di Kuantan Singingi. Koordinasi antar lembaga masih terkesan sektoral dan belum menyatu dalam perencanaan strategis bersama. Beberapa tahapan pemilu berjalan tanpa dukungan maksimal dari dinas terkait, seperti dalam hal penyediaan data penduduk, keamanan TPS, atau fasilitas transportasi (Ardhy et al., 2024). Hal ini memperlambat proses kerja lembaga penyelenggara dan menurunkan efektivitasnya secara keseluruhan. Ketika birokrasi daerah belum sepenuhnya menyatu dalam penyelenggaraan Pilkada, maka tantangan kelembagaan menjadi semakin berat. Dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk memastikan semua pihak berjalan pada koridor yang sama.

Walau menghadapi banyak keterbatasan, lembaga penyelenggara pemilu di Kuantan Singingi tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Mereka melakukan penyesuaian dengan situasi lokal, seperti membentuk tim monitoring wilayah khusus atau memperbanyak titik koordinasi di daerah rawan. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun berada di tengah tantangan, kelembagaan tetap berfungsi dan bergerak. Namun untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, dibutuhkan perbaikan struktur kerja, peningkatan kapasitas petugas, serta penguatan koordinasi lintas instansi. Dengan penguatan ini, kelembagaan di Kuantan Singingi bisa lebih siap dalam menghadapi dinamika Pilkada mendatang.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Perbedaan karakteristik geografis, ekonomi, dan kelembagaan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Kuantan Singingi secara nyata mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pilkada di masing-masing daerah. Di Mojokerto, struktur wilayah yang padat dan terhubung dengan baik, didukung infrastruktur ekonomi serta kelembagaan yang stabil, membentuk pondasi kuat bagi pelaksanaan Pilkada yang tertib, efisien, dan berintegritas. Sementara itu, Kuantan Singingi menghadapi tantangan yang lebih kompleks akibat kendala geografis, keterbatasan fiskal, serta ketimpangan distribusi layanan pemilu di wilayah terpencil.

Dalam hal partisipasi pemilih, Mojokerto menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tiga periode Pilkada terakhir, menandakan adanya pertumbuhan kesadaran politik dan keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, Kuantan Singingi memperlihatkan fluktuasi, meskipun pada Pilkada 2024 terjadi kebangkitan partisipasi yang patut diapresiasi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa konteks lokal memiliki peran dominan dalam membentuk respons politik warga. Kualitas penyelenggaraan Pilkada juga mencerminkan kapasitas kelembagaan di masing-masing daerah. Mojokerto mampu mengelola seluruh

tahapan dengan koordinasi yang solid, pendekatan digital yang adaptif, serta sistem pengawasan partisipatif. Di sisi lain, Kuantan Singingi masih menghadapi hambatan koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan pelatihan petugas, yang berpengaruh pada kecepatan dan akurasi pengelolaan teknis di lapangan.

Hasil penelitian ini menggarisbawahi bahwa efektivitas Pilkada bukan hanya ditentukan oleh desain kelembagaan nasional, tetapi sangat bergantung pada kesiapan lokal yang mencakup geografi, kapasitas ekonomi, serta kualitas interaksi antar lembaga. Oleh karena itu, pembaruan sistem Pilkada perlu mempertimbangkan pendekatan berbasis konteks daerah, agar prinsip demokrasi tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dan berakar pada kebutuhan masyarakat setempat.

REFERENSI

- Akili, R. H. S., & Achmad, W. (2023). The Role of Political Parties in the Implementation of Democratic General Elections In The Indonesian State Administration System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4). Scopus. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.551>
- Aliandu, K. (2024, February 17). Partisipasi Pemilu Kabupaten Mojokerto Meningkatkan. *Jawa Pos: Radar Mojokerto*. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik/824171122/partisipasi-pemilu-kabupaten-mojokerto-meningkat>
- Andrias, M. Y. (2023). *Esensi Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. Tohar Media.
- Ardhy, I., Situmorang, T. P., & Irmayani, T. (2024). Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Masa Non-Tahapan Pemilihan 2020-2022 Di Kabupaten Indragiri Hilir. *PERSPEKTIF*, 13(4), 1033–1048. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i4.12761>
- Ardipandanto, A. (2021). *Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan Dan Kebijakan*. 26(1).
- Budianto, E. E. (2024, July 31). Kinerja Pemkab Mojokerto di 4 Bidang Dinilai Memuaskan Publik. *Detikjatim*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7466689/kinerja-pemkab-mojokerto-di-4-bidang-dinilai-memuaskan-publik>
- Cahya, N. (2025, February 24). FGD Evaluasi Pilkada KPU Kabupaten Mojokerto, Jarak TPS Jadi Sorotan. *Majalah Nurani*. <https://majalahnurani.com/2025/02/24/fgd-evaluasi-pilkada-kpu-kabupaten-mojokerto-jarak-tps-jadi-sorotan/>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto. (2023). *Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Mojokerto*. <https://mojokertokab.go.id/gambaran-umum>
- Djuyandi, Y., & Herdiansah, A. G. (2018). Political Participation of Youth in the West Java Regional Election (Pilkada) in 2018. *Jurnal Bina Praja*, 10(2), 195–207. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.195-207>
- Donno, D., Morrison, K., & Savu, B. (2022). Not All Elections Are Created Equal: Election Quality and Civil Conflict. *Journal of Politics*, 84(1), 134–147. Scopus. <https://doi.org/10.1086/714778>
- Fikri, S. M., & Adytyas, N. O. (2018). Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal

(Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal). *TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 18(2), 167–181. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701>

García, M. J. G. (2020). Direct democracy and lawmaking: Initiatives and referenda at local level in the USA. *Revista de Estudios Regionales*, 119, 171–197. Scopus.

Grossman, G., Michelitch, K., & Prato, C. (2024). The Effect of Sustained Transparency on Electoral Accountability. *American Journal of Political Science*, 68(3), 1022–1040. Scopus. <https://doi.org/10.1111/ajps.12787>

Guyanien, G. E. (2025). Breaking the Indonesian Local Leaders' Problem: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Local Leader's Elections in Indonesia and India. *Yustisia*, 14(1), 23–44. Scopus. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i1.86374>

herawati, R., Saraswati, R., Ristyawati, A., & Nurcahyani, A. S. (2023). Legal Arrangements And Election Oversight During the Covid-19 Pandemic. *Corporate Law and Governance Review*, 5(2), 35–41. Scopus. <https://doi.org/10.22495/clgrv5i2p4>

Hidayat, N., & Febriansyah, R. (2024). *penerapan Good Government dan Electoral Governance Studi Demokrasi Indonesia Pada Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024*. 03(02).

Hysi, A., Pjero, E., Dede, G., & Kolte, A. (2024). The effects of fiscal decentralisation on local finances after the territorial reform of local government in 2015 in Albania. *International Journal of Managerial and Financial Accounting*, 16(1), 69–97. Scopus. <https://doi.org/10.1504/IJMFA.2024.135354>

Iqbal, M. A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Bulungan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 827–836.

Jayuska, R., & Wijaya, A. (2020). Pembaharuan Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 164–182. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1804>

Kabupaten Kuantan Singingi. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi*.

Kabupaten Kuantan Singingi. (2025). *Tentang Kuansing*. <https://kuansing.go.id/id/page/tentang-kuansing.html>

Kaffah, F., Hasanuddin, H., & Marta, A. (2023). Dinamika Pembentukan Koalisi Partai Politik pada Pilkada. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 499. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8367>

Komarudin, U., Handoko, W., & Hussain, F. (2025). Money Politics and Voter Behavior: Factors Behind Incumbent Defeat In Subang Regency's 2024 Regional Election. *Jurnal Hukum Unissula*, 41(2), 216–235. Scopus. <https://doi.org/10.26532/jh.v41i2.44163>

KPU Kabupaten Kuantan Singingi. (2024). *Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*. <https://kab-kuantansingingi.kpu.go.id>

KPU Kabupaten Mojokerto. (2024). *Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024*. <https://kab-mojokerto.kpu.go.id>

- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 4(2), 128-145. <https://doi.org/10.25077/jdpl.4.2.128-145.2022>
- McDonnell, J. (2020). Municipality size, political efficacy and political participation: A systematic review. *Local Government Studies*, 46(3), 331-350. Scopus. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1600510>
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Law Review*, 1(2).
- Nugroho, A. S., Ramadhan, K. M. P., & Pasaribu, D. (2024). Pengaruh Faktor Geografis dalam Preferensi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 24(1), 55-65. <https://doi.org/10.21009/spatial.241.006>
- Pia, A., & Jahroh, F. (2024). Analisis Kapasitas Dan Kualitas Politik Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2024. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 3(2), 1-17.
- Putra, H. P. (2025). *Pengaruh Politik Uang Terhadap Pilihan Masyarakat Dalam Pilkada Tahun 2024 Di Kota Padang*. 9.
- Putra, Z., & Umpi, R. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Penataan Regulasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), Article 1.
- Rahman, R. A., Satriawan, I., & Diaz, M. R. (2022). Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 047. <https://doi.org/10.31078/jk1913>
- Ridhuan, S., Ningsih, R., & Nur, S. M. (2021). Ambiguitas dan Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Perspektif Filosofi Pancasila. *Eduscience : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(01). <https://doi.org/10.47007/edu.v7i01.4643>
- Riewanto, A. (2020). Korelasi Dinasti Pilkada Serentak dengan Korupsi Daerah dan Upaya Pencegahannya dalam Perspektif Hukum Tata Negara Responsif. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 63-75.
- Ristyawati, A., & Saraswati, R. (2018). An Effort of Political Party Simplification for the Effective Government Realization. *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.*, 175(1). Scopus. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012170>
- Romadoni, M. (2024, November 29). Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2024 Turun Dibanding Saat Pilpres, Pemkab Mojokerto Beber Sebabnya. *Tribun Jatim*. <https://jatim.tribunnews.com/2024/11/29/partisipasi-masyarakat-di-pilkada-2024-turun-dibanding-saat-pilpres-pemkab-mojokerto-beber-sebabnya>
- Rumesten, I., & Adisti, N. A. (2022). Phenomenon of the Increasing Single Candidates and Backsliding Democratic Values in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 8(3), 248-257. Scopus. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.2880>
- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 107. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>

- Sarkawi, S. (2017). Kewenangan Daerah Otonom dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Di Indonesia. *JATISWARA*, 30(3). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.116>
- Solihah, R., & Bainus, A. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Steytler, N. (2021). Local Multiparty Democracy in Africa. In *Democracy, Elections, and Constitutionalism in Africa* (pp. 92–116). Scopus. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192894779.003.0005>
- Sudarmanto, K., Sukarna, K., Junaidi, M., Bakri, H., & Astuti, N. (2024). *Peningkatan Pemahaman Money Politic Dalam Pilkada Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang*. 2(2).
- Susandi, W. (2020, December 10). Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Kuansing Hanya 67,41 Persen. *GoRiau.Com*. <https://www.goriau.com/berita/baca/tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-kuansing-hanya-6741-persen.html>
- Sutisna, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 94–112. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964>
- Veenhof, R., Halleck Vega, S. M., & van Leeuwen, E. (2025). Geographies of anti-political establishment parties in the Netherlands: The role of broader welfare and local representation. *Political Geography*, 120. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2025.103353>
- Warganegara, A., Darmastuti, A., Hertanto, H., Krisbintoro, R. S., Febriansyah, M., & Pramono, W. T. (2023). Friends and Neighbours: Electoral Geography in 2020 Local Election of Metro City, Lampung, Indonesia. *Forum Geografi*, 37(2), 191–201. Scopus. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v37i2.23316>
- Yakub, A., & Armunanto, A. A. (2022). Under family control: The trend of sole candidate elections in Indonesia. *International Area Studies Review*, 25(4), 303–321. Scopus. <https://doi.org/10.1177/22338659221120972>
- Zamhasari, Z. (2024). Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(10).